



Pemprov DIJ Siapkan Rp 42 M, Program Belum Terlaksana

PEMPROV DIJ menyiapkan anggaran Rp 42 miliar untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Namun teknis penyelenggaraan program ini masih belum detail dan menunggu

petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pusat.

Program MBG mulai digulirkan kemarin (6/1) di beberapa provinsi di Indonesia ■

Baca Pemprov... Hal 7



Pemprov DIJ Siapkan Rp 42 M, Program Belum Terlaksana

Program ini menyasar anak sekolah, balita hingga ibu hamil dan menyusui.

Kepala Bappeda DIJ Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, program MBG sudah menjadi kebijakan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden Prabowo Subianto. Pemprov sendiri telah mendapatkan perintah secara tertulis terkait penyusunan APBD 2025.

"Memang diminta ada kontribusi dari daerah untuk dapat ikut serta dalam program ini," ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Kepatihan Jogja, kemarin (6/1).

Kontribusi pemprov diatur berdasarkan kemampuan keuangan daerah. DIJ sendiri secara perhitungan kemampuan keuangan masuk dalam kategori sedang. Sehingga kontribusinya sekitar 2,5 persen dari pendapatan asli daerah (PAD). "Kami sudah menyiapkan sebesar Rp 42 miliar," tuturnya.

Hingga saat ini pemprov belum mendapatkan informasi juklak dan juknis penyelenggaraan MBG dari pemerintah pusat. Program itu saat ini masih ditangani langsung oleh pusat, dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN). "Kami hanya menerima saja. Untuk DIJ di mana saja belum terinfokan," bebernya.

Pemprov saat ini baru tahap penyiapan anggaran. Namun secara teknis penerapan belum diinformasikan terkait implementasi di lapangan. Terkait *kick off* program MBG yang direncanakan kemarin, pihaknya belum mendapatkan informasi.

Stok Beras Aman, Sayuran dari Luar

Pemprov DIJ optimis stok beras untuk program MBG tercukupi. Namun untuk komoditas sayuran masih perlu bantuan dari luar daerah.

"Estimasi kebutuhan beras MBG itu *kan* 10.600 ton per tahun," ujar Kepala Bappeda DIJ Ni Made Dwipanti Indrayanti di Kantor Bappeda DIJ, Kepatihan Jogja, kemarin (6/1).

Dengan kebutuhan itu, ia optimis produksi beras di DIJ masih mampu mencukupinya. Hal itu didasarkan pada data total produksi beras tahun 2023 di DIJ sebesar 546 ribu ton per tahun. Kualitas beras juga dinilai bagus. "Tapi kami masih mengambil sayur dari daerah Jateng," tuturnya.

Ia menilai iklim di DIJ kurang cocok untuk menanam komoditas sayur. Namun untuk komoditas seperti bawang merah dan sejenisnya masih bisa ditanam di beberapa daerah di DIJ.

Produktivitas dari segi pertanian juga dinilai mampu untuk meng-cover program MBG. Komoditas sayuran juga masih bisa didapatkan melalui pusat penjualan semacam pasar tradisional untuk memenuhi bahan baku.

"Kami telah berkoordinasi dengan pihak terkait agar tidak *gedandapan* (gelagapan, *Red*) nanti jika menyelenggarakan," bebernya.

Terpisah, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemprov DIJ Ditya Nanaryo Aji menambahkan, informasi yang didapat dari Dindikpora DIJ terkait program MBG yakni pelaksanaan untuk satuan pendidikan sepenuhnya ditangani Badan Gizi Nasional (BGN).

Mereka bekerjasama dengan institusi TNI di masing-masing kabupaten/kota selaku Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPPG). Sesuai dengan kewenangan, DIJ dilakukan di jenjang SMA, SMK dan SLB. "SLB 4.963 (81 satuan pendidikan), SMA 62.728 (176 satuan pendidikan) dan SMK 90.475 (207 satuan pendidikan)," ujarnya.

Pilot project yang ditunjuk langsung oleh BGN sementara berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul dan Sleman. Detailnya SMKN 3 Wonosari, SMAN 1 Wonosari, SMAN 2 Sleman dan SMK Muhammadiyah Mlati.

Anggaran di Kota Jogja Rp 105 M

Alokasi anggaran untuk program MBG di Kota Jogja mencapai Rp 105 miliar. Namun legislatif menyebut nilai itu hanya untuk pengadaan menu makan bergizi selama periode delapan bulan.

Anggota Komisi B DPRD

Kota Jogja Oleg Yohan mengatakan, meskipun program MBG bukan menjadi kewenangan komisinya, hal itu tetap menjadi perhatian dirinya sebagai anggota legislatif. Oleh karena itu, upaya pengawasan pun dilakukan.

Oleg membeberkan, dari hasil pengawasannya total anggaran untuk program MBG mencapai Rp 105 miliar. Hanya saja anggaran sebesar itu baru untuk program delapan bulan. Sehingga kemungkinan besar akan ada anggaran tambahan agar MBG bisa berjalan setahun penuh.

Dia berharap, nantinya ada mekanisme dari pemerintah pusat agar bisa menurunkan tambahan anggaran. Apalagi, pemerintah pusat juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 71 triliun dari APBN.

"Itu mekanismenya yang belum kami tahu. Apakah nanti anggaran dari pusat semua atau dari masing-masing daerah juga harus menyediakan," ujar Oleg saat dikonfirmasi kemarin (6/1).

Menurut politikus Partai Nasdem ini, pihaknya juga sudah melakukan inspeksi ke Disdikpora Kota Jogja soal kesiapan pelaksanaan program MBG. Namun dia mengaku belum bisa mendapatkan data secara rinci. Khususnya perihal jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan porsi makanan yang bakal disediakan.

Oleh karena itu, Oleg memastikan ia akan terus mengawal proses ini agar pelaksanaan MBG di Kota Jogja tidak kacau. Termasuk memastikan kesiapan infrastruktur serta tenaga gizi, tenaga dapur, maupun tenaga audit.

Di sisi lain, dia juga memastikan agar ada pengawasan tingkat lanjut di tingkat daerah. Sebab pada beberapa daerah mulai ramai kasus penipuan yang menyasar vendor sebagai penyedia menu MBG.

Oleg tidak ingin nantinya masyarakat di Kota Jogja menjadi korban modus penipuan yang merugikan tersebut. "Sepanjang yang saya tahu komunikasi dengan dinas pendidikan sudah melakukan persiapan," beber Oleg. (oso/inu/laz/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005